

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 berjalan dengan baik. Dalam aspek isi kebijakan (*content of policy*), Program Sembako dapat mewakili kepentingan dari pemerintah, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga lembaga pengawas seperti LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Tipe manfaat dari Program Sembako dapat meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), menurunkan jumlah penduduk miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) Kota Bekasi di tahun 2023. Terdapat struktur pengambilan keputusan yang jelas dan melibatkan berbagai pelaksana program di dalamnya. Para pelaksana program telah memahami tugas, peran dan memiliki komitmen yang baik.

Dari aspek lingkungan kebijakan (*context of policy*), pembagian kewenangan dan pengelolaan kepentingan antar pelaksana berjalan dengan baik sehingga menciptakan lingkungan kondusif. Karakteristik lembaga dan penguasa menggunakan pendekatan *top-down* dalam implementasi Program Sembako sehingga menciptakan standarisasi pelaksanaan yang konsisten dan kejelasan alur koordinasi. Mengenai kepatuhan para pelaksana, mereka sudah menjalankan prosedur sesuai peraturan yang ada, serta daya tanggap pelaksana dan pendamping sosial menunjukkan respon yang tinggi dalam menangani keluhan KPM. Terakhir, dari aspek hasil akhir (*outcomes*) Program Sembako berhasil mencapai tujuan program untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberi lebih banyak kendali

bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Program Sembako juga mendapat penerimaan dan dukungan yang tinggi dari pendamping sosial, para KPM hingga LSM GMBI.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas Program Sembako. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain, 1) Tingginya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar namun tidak melakukan transaksi, 2) Keterbatasan jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mengakibatkan beban kerja yang berat, 3) Sulitnya pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan oleh KPM, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas program.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Kota Bekasi.

1. Pemerintah perlu menindaklanjuti terkait dengan 3.147 KPM terdaftar yang tidak melakukan pengambilan bantuan, serta melakukan pendampingan yang lebih intensif bagi KPM.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan personel TKSK di setiap kecamatan dan memberikan kompensasi yang lebih layak bagi TKSK agar mereka dapat bekerja dengan lebih optimal.
3. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pemantauan penggunaan manfaat Program Sembako karena perubahan bentuk bantuan dari sembako menjadi uang tunai. Hal ini untuk memastikan bantuan dimanfaatkan secara optimal oleh KPM sesuai tujuan program.